

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai dinamika pertumbuhan ekonomi di tingkat wilayah, sekaligus mengukur seberapa efektif upaya pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi dalam esensinya, merujuk pada kondisi di mana terjadi peningkatan signifikan dalam produksi barang dan jasa. Lebih dalam lagi, pertumbuhan ini mencerminkan kapasitas suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan penduduknya atas berbagai jenis barang ekonomi, yang berkembang secara harmonis seiring dengan kemajuan ekonomi serta penyesuaian kelembagaan yang diperlukan (Agustina & Hadi, 2021).

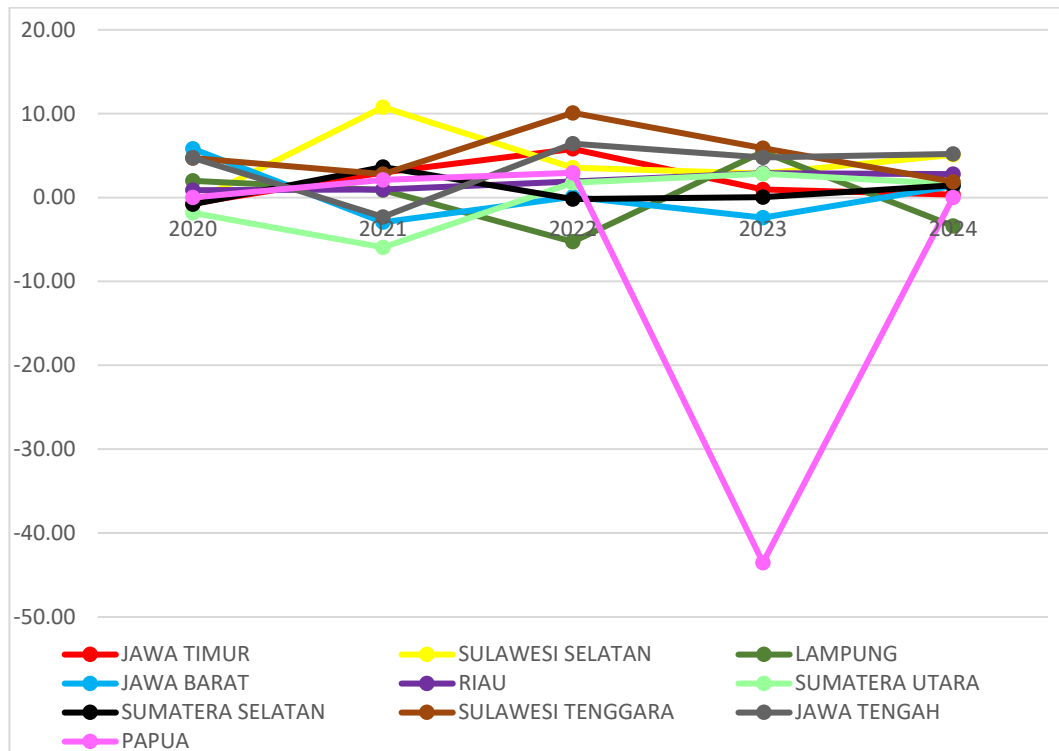
Sektor perikanan memegang peranan vital dalam penyediaan bahan pangan, penciptaan lapangan pekerjaan, fasilitas rekreasi, perdagangan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya tersebut, tetapi meluas hingga ke wilayah atau komunitas tertentu. Pengembangan sektor perikanan memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin dalam PDB yang memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Mardyani & Yulianti, 2020).

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2024) kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional tahun 2024 tercatat sebesar 2,34% pada Triwulan I, 2,54% pada Triwulan II, 2,54% pada Triwulan III, 2,59% pada Triwulan IV. Kenaikan kontribusi tersebut menunjukkan tren positif dalam kinerja

subsektor perikanan sepanjang tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan peran nyata subsektor perikanan dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, meskipun terdapat peningkatan secara berkala setiap triwulan, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional tetap terbilang rendah apabila dibandingkan dengan potensi sumber daya kelautan yang dimiliki Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi subsektor perikanan belum sepenuhnya dieksploitasi secara maksimal. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah peningkatan efisiensi dan inovasi subsektor perikanan guna memperkuat perannya dalam perekonomian nasional secara lestari.

Jika dilihat dari faktanya, pembangunan perikanan dan kelautan memegang peran strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Indonesia seharusnya mampu mendominasi pangsa pasar perikanan dunia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi kelautan belum dimanfaatkan secara optimal dan pengelolaannya belum maksimal. Sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan menyumbang kontribusi besar dalam pembentukan PDB nasional, berada di posisi ketiga setelah sektor industri pengolahan, reparasi mobil dan sepeda motor (Rahayu *et al.*, 2022).

Berikut merupakan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir disajikan dalam Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1. 1 Perkembangan PDRB Subsektor Perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2026

Gambar diatas menunjukkan tren Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia dalam satuan persen selama periode 2020 hingga 2024. Sepuluh provinsi tersebut merupakan provinsi penyumbang terbesar PDRB subsektor perikanan di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Papua.

PDRB subsektor perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami fenomena dinamika angka yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai PDRB tercatat -0,57 persen yang turun karena dampak pandemi Covid-19. Gejala pemulihan terlihat secara nyata mulai tahun 2021 sampai 2024 yaitu terjadi peningkatan yang menandakan adanya pemulihan pasca pandemi dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabil. Pemulihan ini tercermin dalam peningkatan produksi

perikanan dan modernisasi alat tangkap. Fenomena ini menunjukkan bahwa aktivitas produksi dan pengolahan perikanan di Sulawesi Selatan tetap kuat dan menjadi tulang punggung ekonomi sektor perikanan di provinsi tersebut (DKP Sulsel, 2023).

PDRB subsektor perikanan Provinsi Papua mengalami tren positif hingga tahun 2022 sebesar 2,96 persen diikuti penurunan tajam pada tahun 2023 dan stabilisasi rendah pada tahun 2024 sebesar 0,02 persen. Penurunan drastis pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan oleh pemekaran wilayah provinsi pada tahun 2022 yang membentuk Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Hal ini menyebabkan perhitungan PDRB Papua pasca pemekaran hanya mencakup 9 Kabupaten/Kota utara, seperti Jayapura, Biak Numfor, dan Waropen, tanpa menyertakan kontribusi signifikan dari sektor perikanan di kawasan selatan seperti Kabupaten Merauke dan Boven Digoel yang kini termasuk Provinsi Papua Selatan. Pemekaran ini menjadi alasan utama PDRB Papua mengalami penurunan drastis dengan sektor primer termasuk perikanan kehilangan porsi besar karena relokasi wilayah ikan tangkap. Tidak ditemukan faktor lain seperti bencana alam untuk sektor perikanan Papua tahun 2023-2024 (jubi.id, 2024).

PDRB subsektor perikanan Provinsi Sumatera Utara mengalami tren fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 dan stabilisasi rendah pada tahun 2022 sebesar 91,77 persen. Penurunan drastis pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh kebijakan relokasi Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba berdasarkan Perpres No. 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba, yang meningkatkan biaya operasional pelaku usaha dan menekan produksi perikanan. Kebijakan ini memaksa

pemindahan lokasi budidaya ikan nila dan ikan lainnya mengurangi output secara signifikan (Dewan Pertahanan Nasional R.I., 2024).

Berdasarkan gambar dan penjelasan tersebut, sektor perikanan Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, namun saat ini menghadapi dilema kompleks antara potensi besar dan tantangan keberlanjutan yang mendesak. Berdasarkan Keputusan Menteri KKP No. 19 Tahun 2022, sebagian wilayah perairan Indonesia kini mengalami *overfishing* (tangkap ikan berlebihan), yang diperparah oleh maraknya praktik *IUU fishing* (penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur) yang tidak hanya merusak ekosistem laut, tetapi juga mendistorsi rantai pasok perikanan global. Di samping kendala ekologis itu, kinerja sektor perikanan nasional masih belum mencapai standar keberlanjutan yang ditetapkan dalam UU RI No. 45 Tahun 2009. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya teknologi, kurangnya akses terhadap modal, serta kekurangan sumber daya manusia baik dari jumlah maupun kompetensi, serta tidak maksimalnya alokasi anggaran sektor perikanan. Selain itu, kebijakan penetapan harga ikan oleh pemerintah belum merata di Indonesia (Haris, 2025).

Nelayan adalah pelaku usaha yang secara aktif menangkap ikan dan organisme perairan lainnya untuk memperoleh penghasilan. Tingkat kesejahteraan nelayan ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, masyarakat nelayan di Indonesia sering mengalami kesulitan karena pengeluaran untuk bahan pokok melebihi pendapatan mereka, sehingga diperlukan penanganan bijaksana untuk mencegah risiko jangka panjang terhadap kesejahteraan nelayan (Rahayu *et al.*, 2022).

Rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi salah satu hambatan utama. Sebagian besar nelayan belum tamat SMA atau sederajat. Akibatnya, mereka masih mengandalkan perahu tradisional dengan teknik dan teknologi rendah, yang menyebabkan hasil tangkapan kurang optimal serta kurangnya pengetahuan tentang jalur penangkapan ikan yang efektif. Keterbatasan ini juga berdampak pada rendahnya nilai jual ikan karena kurangnya penguasaan teknik pengolahan, penanganan pasca panen dan akses pasar yang lebih baik, sehingga pendapatan nelayan tetap tertekan. Oleh karena itu, mengetahui tingkat perkembangan sektor perikanan sangat krusial sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan, efektivitas program, dan dasar perencanaan masa depan. (Rahayu *et al.*, 2022).

Menurut Robert Solow dan Trevor Swan, pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah yang diukur dengan PDRB tergantung pada peningkatan pasokan faktor produksi seperti populasi, tenaga kerja, akumulasi modal serta kemajuan teknologi (Sari, 2023). Faktor-faktor yang memengaruhi PDRB subsektor perikanan pada penelitian ini di antaranya volume produksi perikanan tangkap, angka konsumsi ikan dan volume ekspor perikanan.

Aktivitas di sektor perikanan umumnya terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Menurut definisi dari Direktorat Jendral Perikanan, perikanan tangkap merujuk pada kegiatan ekonomi dimana masyarakat menangkap ikan atau mengumpulkan hewan/tumbuhan akuatik yang hidup di laut atau perairan umum. Sementara, budidaya perikanan didefinisikan sebagai upaya memproduksi organisme air untuk mendapatkan keuntungan finansial (Budiyanto *et al.*, 2023).

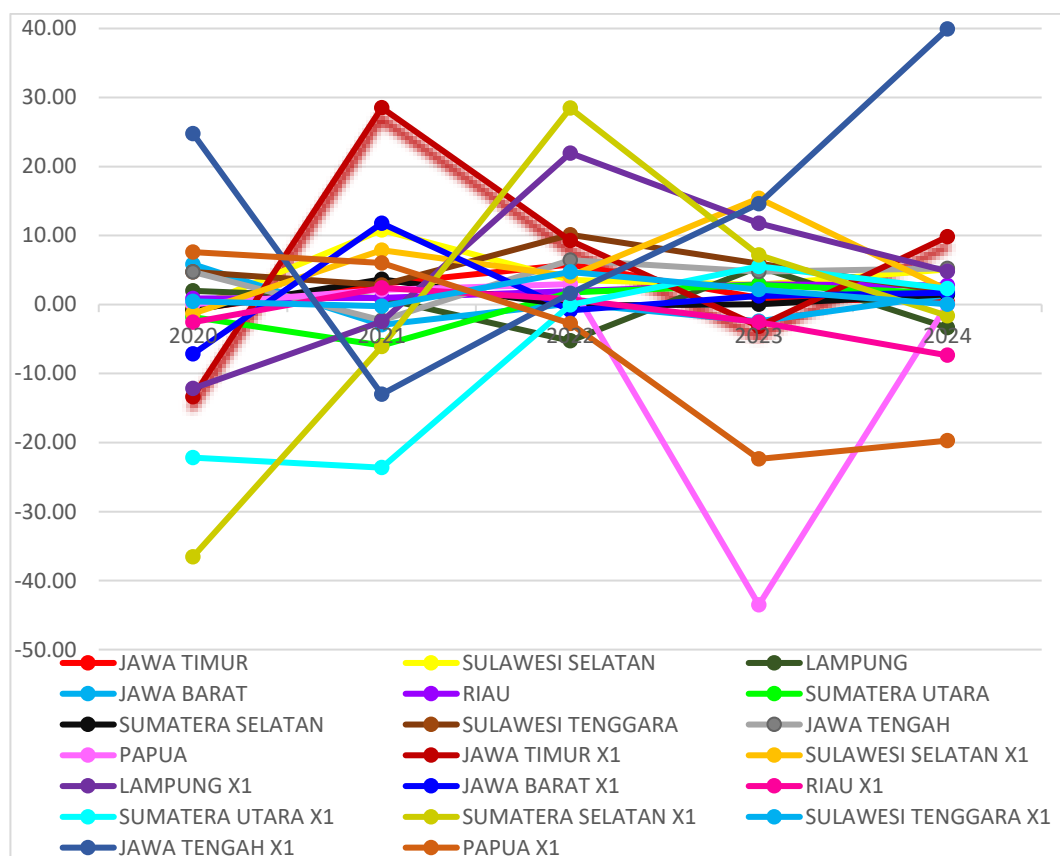
Perikanan budidaya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, penelitian ini secara khusus berfokus pada perikanan tangkap dengan tiga pertimbangan utama. Pertama, dari sisi kontribusi nasional, perikanan tangkap secara historis mendominasi total produksi perikanan Indonesia dengan kontribusi rata-rata mencapai 60–65% dari total produksi perikanan nasional (KKP, 2024). Kedua, dari sisi keterwakilan wilayah, kesepuluh provinsi dalam sampel penelitian ini merupakan provinsi dengan basis perikanan tangkap yang dominan. Ketiga, dari sisi ketersediaan dan konsistensi data, data volume produksi perikanan tangkap tersedia secara lengkap dan konsisten di sepuluh provinsi.

Berdasarkan Statistik Perikanan Tangkap Indonesia dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, perikanan tangkap merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup penangkapan atau pengumpulan ikan, hewan air, maupun tanaman air. Kegiatan ini berorientasi pada sumber daya hidup bebas di laut atau perairan umum dan tidak dimiliki oleh individu (Mardyani & Yulianti, 2020).

Menurut Sukirno, (2000), dalam Nasution *et al.*, (2024), mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung apabila terdapat peningkatan pembangunan ekonomi yang menghasilkan perluasan produksi barang dan jasa di suatu negara, seperti penambahan jumlah produksi barang yang menghasilkan output. Peningkatan produksi barang dan jasa menjadi inti dari dinamika ini, dimana lonjakan output produksi secara langsung mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect pada pendapatan nasional. Oleh karena itu, setiap peningkatan produksi akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Teori pertumbuhan ekonomi mencakup berbagai aliran, seperti teori Klasik, Harrod-Domar, dan Schumpeter, dimana peningkatan produksi menjadi mekanisme utama yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui ekspansi PDRB. Menurut Sukirno, (2012), menyatakan bahwa dalam pandangan teori klasik, peningkatan produksi barang dan jasa secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena output yang lebih tinggi menghasilkan pendapatan nasional yang lebih besar (Widyastuti & Nugraha, 2021).

Berikut merupakan perkembangan PDRB subsektor perikanan volume produksi perikanan tangkap pada sepuluh provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir disajikan dalam Gambar 1. 2 dibawah ini:



Gambar 1. 2 Perkembangan PDRB Subsektor Perikanan dan Volume Produksi Perikanan Tangkap pada sepuluh provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP), 2026

Gambar diatas menunjukkan tren volume produksi perikanan tangkap pada sepuluh provinsi di Indonesia dalam satuan persen selama periode 2020 hingga 2024. Produksi perikanan tangkap tertinggi berada pada Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebesar 9,83 persen. Angka ini mencerminkan peran vital provinsi ini sebagai pusat produksi perikanan tangkap nasional.

Fenomena menarik pada variabel volume produksi perikanan tangkap bila dilihat dari rata-rata sepuluh provinsi, yaitu terdapat perbedaan pola pengolahan, pemasaran serta kebijakan pengembangan sektor perikanan. Produksi perikanan tangkap memang memberikan pengaruh positif terhadap PDRB subsektor perikanan, namun besarnya kontribusi juga dipengaruhi oleh beberapa variabel lain seperti jumlah nelayan, dan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) yang turut berkorelasi terhadap PDRB subsektor perikanan (Haris, 2025). Hal ini terlihat pada perbandingan antar Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Di kedua provinsi tersebut, volume produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara secara spesifik relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau, namun di sisi lain PDRB subsektor perikanan Provinsi Riau menunjukkan angka yang lebih besar.

Fenomena selanjutnya terjadi pada Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021, dimana terjadi penurunan sebesar -2,49 persen, tetapi PDRB subsektor perikanan Provinsi Lampung tahun 2020 dan 2021 justru meningkat sebesar 0,91 persen. Hal ini tidak sejalan dengan teori produksi dan PDRB karena ketika terjadi penurunan pada produksi perikanan tetapi PDRB subsektor perikanan justru mengalami peningkatan.

Fenomena serupa terjadi pada Provinsi Jawa Barat tahun 2020, dimana terjadi penurunan sebesar -7,16 persen, tetapi PDRB subsektor perikanan Provinsi

Jawa Barat tahun 2020 justru meningkat sebesar 5,83 persen. Hal ini tidak sejalan dengan teori produksi dengan PDRB karena ketika terjadi penurunan pada produksi perikanan tetapi PDRB subsektor perikanan justru mengalami peningkatan.

Adapun faktor yang memengaruhi penurunan volume produksi perikanan tangkap adalah pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas para nelayan serta rantai pasok. Faktor terbesar yang sering menimbulkan masalah bagi nelayan di laut adalah pemanasan global. Pemanasan global merupakan proses peningkatan suhu rata-rata bumi yang berdampak pada perubahan iklim di berbagai wilayah dunia. Di bidang kelautan fenomena ini memicu peningkatan suhu permukaan laut, peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang dipicu oleh *El Nino* dan *La Nina*. *El Nino* terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik lebih hangat dari kondisi normal yang biasanya membuat musim kemarau lebih panjang dan kering. *La Nina* merupakan kebalikan dari *El Nino* yang terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik lebih dingin dari normal yang cenderung membuat musim hujan lebih panjang dan basah (Illahi *et al.*, 2023).

Perubahan iklim berdampak merugikan secara langsung maupun tidak langsung, karena fenomena ini tak terhindarkan dan mengubah ekosistem laut serta sumber daya ikan. Peningkatan suhu permukaan laut dan cuaca ekstrem menyebabkan gelombang besar yang menghambat nelayan mencapai lokasi tangkap, sehingga mengurangi hari melaut dan pendapatan masyarakat. Kondisi laut tidak bersahabat ini memaksa penundaan aktivitas pada berbagai aspek kehidupan manusia di bidang perikanan (Illahi *et al.*, 2023).

Produksi perikanan merupakan sumber daya yang khas karena rentan menurun dan membutuhkan pengelolaan yang kompleks, sehingga perlu perhatian

khusus agar potensinya tetap terjaga dan berkembang secara berkelanjutan (Marjusni & Idris, 2023). Sebagaimana penelitian dari Safitri *et al.*, (2025), Kusmaputri & Diswandi, (2024), Nurdianti *et al.*, (2023), Rubianti, (2023), dan Widyastuti & Nugraha, (2021) yang mengemukakan bahwa produksi perikanan berpengaruh signifikan terhadap PDRB subsektor perikanan.

Namun, penelitian dari Budiyanto *et al.*, (2023), menyatakan hasil yang berbeda, dimana hasil penelitian menyatakan bahwa produksi perikanan tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB subsektor perikanan.

Salah satu faktor penting yang menentukan PDRB subsektor perikanan adalah konsumsi rumah tangga, terutama terhadap produk perikanan. Konsumsi rumah tangga dalam subsektor perikanan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dengan meningkatkan output perekonomian secara keseluruhan (Marjusni & Idris, 2023).

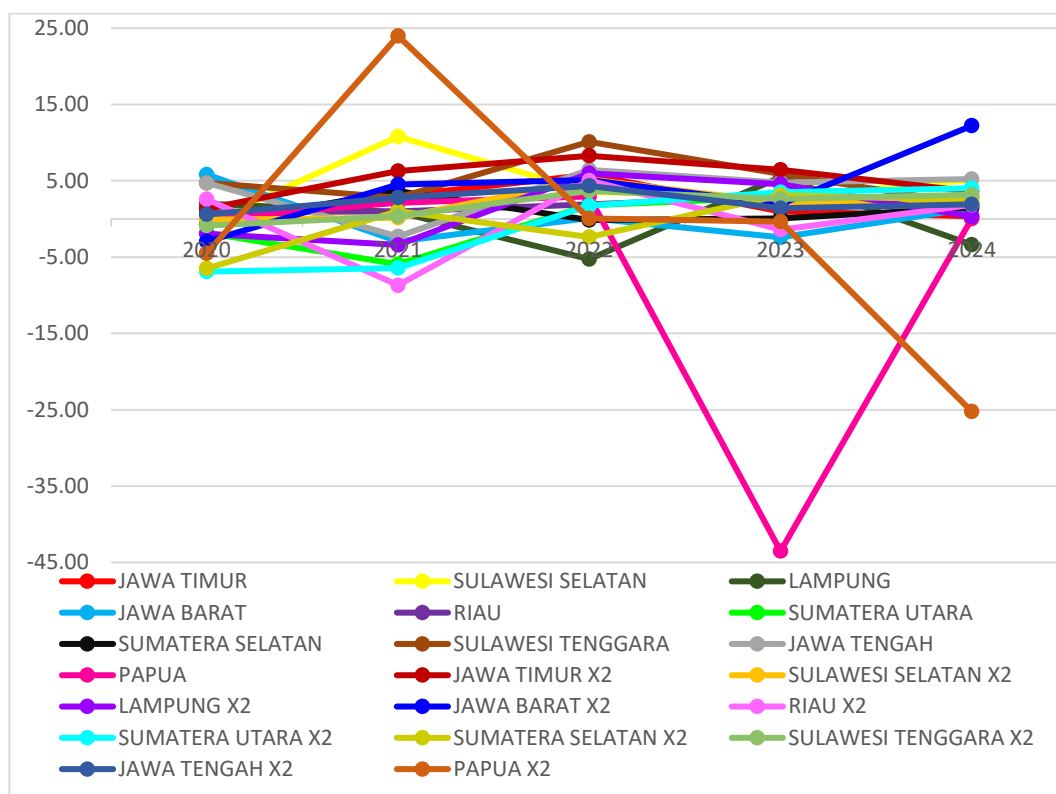
Menurut Suparmoko & Sofilda, (2016), konsep konsumsi yang merupakan terjemahan dari bahasa inggris *Consumption*, artinya pengeluaran yang dilakukan rumah tangga guna membeli barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan pribadi konsumen. Pengeluaran masyarakat membeli makanan, pakaian, dan barang kebutuhan lainnya dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi.

Menurut Mankiw, (2014), dalam Kusmaputri & Diswandi, (2024), permintaan akan barang atau jasa meningkat seiring dengan naiknya aktivitas konsumsi dalam masyarakat, sesuai dengan teori penawaran dan permintaan. Ketika konsumsi ikan bertambah, hal tersebut mencerminkan kekuatan pasar domestik yang lebih besar untuk sektor perikanan, yang berkontribusi pada stabilitas harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha nelayan di

suatu negara. Sehingga peningkatan konsumsi perikanan yang berkelanjutan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Konsumsi ikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Di sejumlah negara, perikanan menjadi penggerak pertumbuhan karena ikan merupakan sumber daya bernilai tinggi yang dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan konsumsi ikan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat perekonomian nasional (Rubianti, 2023).

Berikut merupakan perkembangan PDRB subsektor perikanan dan angka konsumsi ikan pada sepuluh provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir disajikan dalam Gambar 1. 3 dibawah ini:



Gambar 1. 3 Perkembangan PDRB Subsektor Perikanan dan Angka Konsumsi Ikan pada sepuluh provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP), 2026

Gambar diatas menunjukkan tren angka konsumsi ikan pada sepuluh provinsi di Indonesia dalam satuan persen selama periode 2020 hingga 2024. Angka konsumsi ikan tertinggi berada pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional dan mencerminkan budaya pangan yang sangat bergantung pada hasil laut serta akses yang sangat mudah ke sumber perikanan.

Fenomena menarik pada variabel angka konsumsi ikan bila dilihat dari rata-rata sepuluh provinsi, yaitu terdapat perbedaan sektor pemimpin dalam 2 provinsi. Di Provinsi Sulawesi Selatan, sektor perikanan memang sudah menjadi *the leading sector* (sektor pemimpin) yang didukung ketersediaan suberdaya perikanan laut yang melimpah di wilayah pesisirnya, terutama komoditas unggulan seperti tuna, kakap, bandeng dan udang. Industri pengolahan perikanan seperti kaleng ikan dan industri turunan jenis lain untuk komoditas udang dan perikanan laut sudah mendominasi (Arman *et al.*, 2020). Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan juga sangat bergantung di bidang perikanan yang mendukung perekonomiannya (Nur'aini *et al.*, 2025). Dalam perbandingan antara Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur, di satu sisi, angka konsumsi ikan Provinsi Sulawesi Selatan secara spesifik relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur, namun di sisi lain PDRB subsektor perikanan Provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang lebih besar. Hal ini menegaskan bahwa angka konsumsi ikan tidak secara langsung berdampak besar pada PDRB subsektor perikanan, karena kontribusi PDRB subsektor perikanan dipengaruhi oleh seberapa kuat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi tersebut.

Fenomena selanjutnya terjadi pada Provinsi Riau tahun 2021, dimana terjadi penurunan tajam sebesar -8,68 persen, tetapi PDRB subsektor perikanan justru

mengalami peningkatan sebesar 0,97 persen. Fenomena yang sama juga terjadi pada Provinsi Lampung tahun 2021. Hal ini tidak sejalan dengan teori konsumsi dengan PDRB subsektor perikanan karena angka konsumsi ikan mengalami penurunan tajam sedangkan PDRB subsektor perikanan mengalami peningkatan.

Adapun faktor yang memengaruhi penurunan angka konsumsi ikan disebabkan karena perubahan orientasi pasar, dimana sebagian besar produksi ikan terutama tuna banyak mengalir ke luar daerah sehingga pasokan domestik menyempit dan harga lokal naik. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena rumah tangga masih terkena dampak pandemi di antaranya pendapatan menurun, kecenderungan belanja bergeser sehingga konsumsi ikan turun (Bank Indonesia, 2021).

Fenomena selanjutnya terjadi pada Provinsi Jawa Barat tahun 2023, dimana terjadi peningkatan angka konsumsi ikan sebesar 1,91 persen, tetapi PDRB subsektor perikanan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 justru mengalami penurunan sebesar -2,40. Hal ini tidak sejalan dengan teori konsumsi dengan PDRB karena ketika terjadi peningkatan pada angka konsumsi ikan tetapi PDRB subsektor perikanan justru mengalami penurunan.

Fenomena peningkatan angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 karena kampanye gizi "gerilya protein ikan" dan program peningkatan konsumsi ikan yaitu program distribusi ikan murah oleh pemda. Gerilya protein ikan merupakan kampanye nasional dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia yang diluncurkan untuk mendorong konsumsi ikan minimal 56 kg/kapita/tahun, dengan strategi gerilya alias serangan cepat melalui edukasi gizi, promosi di sekolah, pasar dan komunitas. PDRB subsektor perikanan dapat turun

jika produksi dan profitabilitas pelaku usaha perikanan melemah meskipun konsumsi ikan masyarakat meningkat dan sebagian besar disuplai dari luar daerah (KKP, 2024).

Konsumsi ikan di Indonesia masih dinilai rendah dan belum merata di berbagai daerah dilihat berdasarkan target konsumsi ikan nasional berdasarkan KKP, maka pemerintah terus menjalankan program yang bertujuan menaikkan konsumsi ikan. Kebijakan yang dilakukan fokus pada pengembangan industri perikanan sebagai pendorong ekonomi. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan, tingkat konsumsi ikan tetap rendah, terutama terlihat dari tingginya angka *stunting* pada tahun 2020. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari standar usia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menjalankan program Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan) guna meningkatkan konsumsi ikan (Marjusni & Idris, 2023).

Perkembangan sektor perikanan, khususnya melalui peningkatan konsumsi ikan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagaimana penelitian dari Daroen *et al.*, (2024), Kusmaputri & Diswandi, (2024), Rubianti, (2023), dan Marjusni & Idris, (2023) yang mengemukakan bahwa angka konsumsi ikan berpengaruh signifikan terhadap PDRB subsektor perikanan.

Namun, penelitian dari Nasution *et al.*, (2024), Padli *et al.*, (2020), menunjukkan hasil yang berbeda, dimana konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian nasional juga tampak dari aktivitas ekspornya, yang memberikan andil penting dalam membentuk output

ekonomi, meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan (Kusmaputri & Diswandi, 2024).

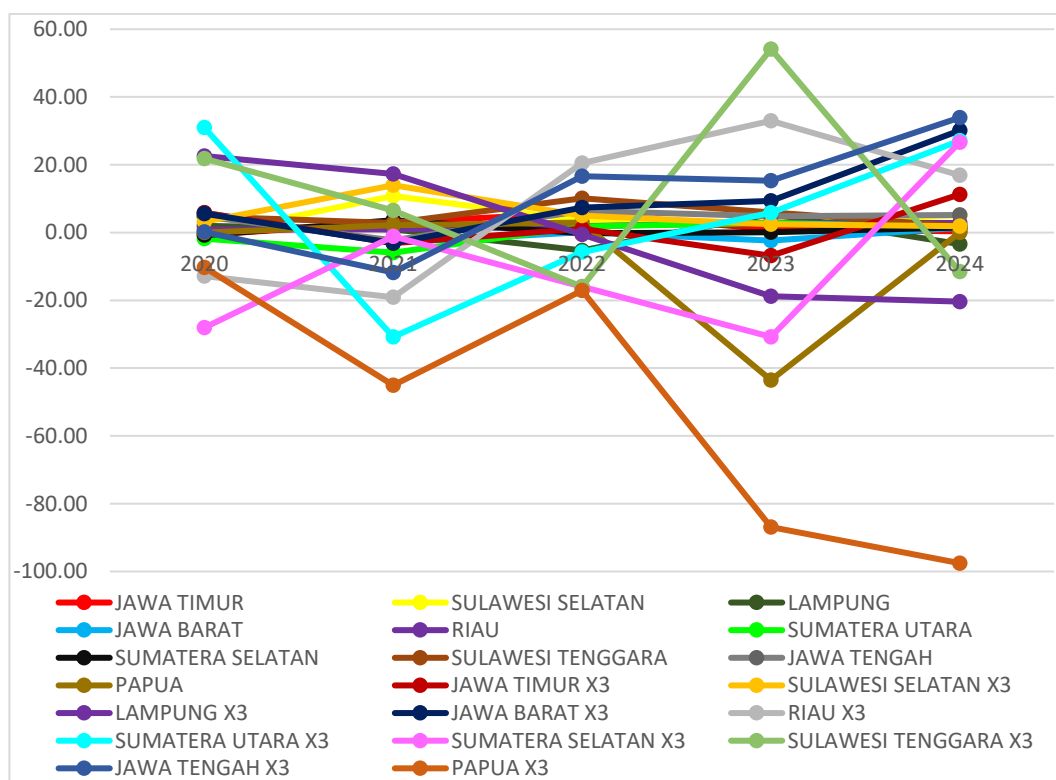
Menurut Todaro, (2006), ekspor adalah aktivitas penjualan komoditas domestik ke negara lain atau pihak asing, yang pelaksanaannya harus tunduk pada regulasi pemerintah dan melibatkan penggunaan bahasa asing. Imbalan utama yang diterima dari kegiatan ekspor adalah pembayaran dalam bentuk valuta asing (devisa), yang berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan penting bagi negara. Ekspor adalah kegiatan perdagangan yang mendorong peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, dan memperkuat stabilitas politik dan efisiensi kelembagaan sosial (Agustina *et al.*, 2023).

Menurut Jhingan, (2004), dalam Marjusni & Idris, (2023), di Indonesia, ekspor produk perikanan memberikan kontribusi devisa yang signifikan yang meningkatkan pendapatan bagi para nelayan dan sekaligus meningkatkan perekonomian negara. Perdagangan internasional muncul karena adanya keunggulan komparatif atau perbedaan yang saling menguntungkan antara kondisi dalam negeri dan luar negeri. Ekspor memberikan manfaat bagi suatu negara melalui peningkatan pendapatan nasional, yang selanjutnya akan menaikkan produksi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, ketika terjadi lonjakan ekspor cenderung mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sukirno, (2011), dalam Agustina *et al.*, (2023), dalam pelaksanaannya, pembayaran ekspor dapat dilakukan melalui tunai atau kredit. Metode pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan internasional dan disepakati oleh eksportir dan importir meliputi pembayaran di muka, penggunaan kredit, atau metode pembayaran lain yang berlaku dalam perdagangan luar negeri.

Menurut teori perdagangan internasional, ekspor memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan nasional serta mendorong investasi di sektor-sektor produktif. Peningkatan ekspor di bidang perikanan dapat memperluas akses ke pasar global yang pada dasarnya akan meningkatkan perekonomian. Selain itu, ekspor perikanan membuka peluang investasi yang dapat memperkuat pertumbuhan usaha dan mempercepat perkembangan ekonomi di sektor tersebut (Kusmaputri & Diswandi, 2024).

Berikut perkembangan PDRB subsektor perikanan dan volume ekspor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia selama lima tahun terakhir disajikan dalam Gambar 1. 4 dibawah ini:



Gambar 1. 4 Perkembangan PDRB Subsektor Perikanan dan Volume Ekspor Perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP), 2026

Gambar diatas menunjukkan tren volume ekspor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia dalam satuan persen selama periode 2020 hingga 2024. Volume ekspor perikanan tertinggi berada pada Provinsi Jawa Timur tahun 2024 sebesar 11,26 persen. Angka volume ekspor perikanan ini mengindikasikan peran yang sangat dominan dalam perdagangan luar negeri yang merupakan eksportir utama komoditas perikanan.

Fenomena menarik ditemukan dalam rata-rata sepuluh provinsi, bahwa pada beberapa kajian menunjukkan di beberapa provinsi Sumatera, peranan PDRB subsektor perikanan relatif penting yang menandakan perikanan bukan hanya sektor primer tetapi juga berperan sebagai pendorong pendapatan daerah. Di Provinsi Riau, struktur ekonomi mendorong pengembangan perikanan budidaya dan pengolahan ikan sehingga PDRB perikanan sebagai nilai output lokal lebih besar meskipun volume ekspor fisik belum sebesar Provinsi Sumatera Utara (Ramadona *et al.*, 2020). Dalam perbandingan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau, di satu sisi, volume ekspor perikanan Provinsi Sumatera Utara secara spesifik relatif lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau, namun di sisi lain PDRB subsektor perikanan Provinsi Riau memberikan angka lebih besar. Hal ini menunjukkan pendapatan daerah dari sektor perikanan lebih ditentukan oleh seberapa besar nilai tambah dan pengolahan hasil perikanan daripada volume ekspor fisiknya.

Fenomena selanjutnya terjadi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2023, dimana terjadi penurunan volume ekspor perikanan sebesar -6,83 persen, tetapi PDRB subsektor perikanan justru meningkat sebesar 0,97 persen. Hal ini tidak sejalan dengan teori ekspor dan PDRB karena ketika terjadi penurunan pada

volume ekspor perikanan tetapi PDRB subsektor perikanan justru mengalami peningkatan.

Fenomena penurunan ekspor perikanan dipicu oleh tingginya permintaan domestik akibat pertumbuhan ekonomi yang melaju, dimana sebagian besar produksi perikanan diserap oleh pasar dalam negeri. Selain itu, permintaan produk perikanan dalam negeri cukup tinggi membuat sejumlah produksi lebih diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan internal, sehingga berpengaruh terhadap penurunan volume ekspor Provinsi Jawa Timur (Liputan6.com, 2024).

Fenomena selanjutnya pada Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,21 persen, tetapi PDRB subsektor perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 justru menurun sebesar -0,57 persen. Hal ini tidak sejalan dengan teori ekspor dan PDRB karena volume ekspor perikanan mengalami peningkatan sedangkan PDRB subsektor perikanan justru mengalami penurunan. Peningkatan ekspor perikanan tersebut dipicu oleh meningkatnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang terlibat di pasar ekspor, dimana pada tahun 2019 keterlibatan UPI sebanyak 118 UPI, lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 130 UPI. Peningkatan UPI tersebut mendorong pemerintah untuk terus membuka akses ekspor, mengingat ekspor membawa dinamika ekonomi bagi masyarakat. Ekspor perikanan Provinsi Sulawesi Selatan telah menjangkau sekitar 50 negara, 5 di antaranya yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Vietnam, Amerika Serikat, dan Jepang (Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BBKIPM) Makassar, 2021).

Fenomena menarik ditemukan dalam perbandingan seluruh variabel di antara Provinsi Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Papua. Provinsi Jawa Timur

merupakan provinsi penghasil perikanan tertinggi tercermin dari angka PDRB subsektor perikanannya, volume produksi perikanan dan volume ekspor perikanan yang lebih tinggi dibanding provinsi lain. Namun, angka konsumsi ikan di provinsi tersebut relatif rendah. Seharusnya, dengan PDRB subsektor perikanan yang tinggi, konsumsi ikan juga meningkat. Rendahnya konsumsi ikan menunjukkan bahwa minat masyarakat Jawa Timur terhadap ikan masih terbatas. Provinsi tersebut lebih memprioritaskan ekspor perikanan sehingga kontribusinya terhadap PDRB menjadi dominan. Penduduknya lebih banyak mengonsumsi daging sapi dan ayam daripada ikan. Jawa Timur dihuni oleh masyarakat yang sangat beragam, dengan latar belakang sosial dan status ekonomi yang berbeda-beda. Keberagaman itu turut membentuk pola kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, termasuk dalam konsumsi makanannya (Virgantari *et al.*, 2022).

Fenomena menarik juga ditemukan dalam Provinsi Sumatera Selatan bila dilihat dari rata-rata sejumlah provinsi penghasil perikanan. Secara umum, produksi perikanan Sumatera Selatan cenderung lebih kecil dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah, serta volume ekspor cenderung rendah, meskipun angka konsumsi ikan secara umum lebih tinggi. Potensi perikanan Sumatera Selatan sebenarnya sangat besar, namun pemanfaatannya belum optimal karena informasi sumber daya belum memadai di wilayah administratif setempat. Hal ini diperparah lagi oleh kurangnya teknologi yang efektif dan efisien, persaingan antara alat penangkapan ikan, infrastruktur pelabuhan tidak memadai, kurangnya kapasitas penangkapan ikan, serta minimnya investasi dan pemasaran swasta (Nurdianti *et al.*, 2023). Secara umum, budaya mengonsumsi ikan sudah berkembang, tetapi yang lebih banyak dikonsumsi adalah olahan yang sudah dicampur dengan bahan

lain sehingga kandungan ikan menjadi lebih kecil. Karena itu, provinsi ini termasuk ke dalam klaster menengah dalam hal konsumsi ikan (Virgantari *et al.*, 2022).

Kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia terus menunjukkan tren positif. Amerika Serikat masih menjadi negara tujuan ekspor utama dengan kontribusi sebesar 31,8% dari total nilai ekspor perikanan nasional, diikuti oleh Tiongkok sebesar 19,5%, kawasan ASEAN sebesar 16,0%, Jepang sebesar 9,8%, dan Uni Eropa sebesar 7,2%. Secara komoditas, udang tetap menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan kontribusi 29,8% dari total ekspor, disusul oleh tuna-cakalang, cumi, sotong, gurita, kepiting, serta rumput laut (KKP, 2024).

Di tengah dinamika industri perikanan yang berkembang, peningkatan volume ekspor perikanan difokuskan sebagai instrumen pembangunan yang mendukung rantai pasok. Sebagaimana penelitian dari Ramadhani, (2024), Kusmaputri & Diswandi, (2024), Marjusni & Idris, (2023), dan Agustina *et al.*, (2023) yang mengemukakan bahwa volume ekspor perikanan berpengaruh signifikan terhadap PDRB subsektor perikanan.

Namun, penelitian dari Nasution *et al.*, (2024), dan Kusuma *et al.*, (2021) mengemukakan hasil yang berbeda, dimana ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas pengaruh variabel perikanan secara parsial maupun kombinasi terhadap PDRB, sebagian penelitian lebih menekankan pada studi kasus sebuah kawasan regional tertentu tanpa cakupan provinsi yang mendetail seperti provinsi penghasil perikanan tertinggi (misalnya Jawa Timur, Sulawesi Selatan). Sebagian penelitian terdahulu umumnya menggunakan pertumbuhan ekonomi atau PDRB secara umum tanpa spesifikasi

PDRB subsektor perikanan, serta tidak mengintegrasikan volume produksi perikanan tangkap, angka konsumsi ikan, dan volume ekspor perikanan secara simultan dengan model regresi data panel. Misalnya, penelitian Widyastuti & Nugraha, (2021), yang menganalisis pengaruh produksi perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, penelitian Rubianti, (2023), yang meneliti dampak kenaikan konsumsi produk perikanan terhadap perekonomian nasional, serta penelitian Ramadhani, (2024), yang meneliti pengaruh ekspor komoditas perikanan terhadap perekonomian Indonesia. Penelitian ini dianggap mampu mengisi gap tersebut dengan menggabungkan sepuluh provinsi penghasil perikanan tertinggi di Indonesia dengan menggunakan regresi data panel periode tahun terbaru yaitu 2019-2024 berdasarkan data sekunder terbaru.

Dalam penelitian ini, dipilih sepuluh provinsi penghasil perikanan tertinggi karena kontribusinya yang besar terhadap perikanan nasional. Pemilihan sepuluh provinsi dipilih untuk menjaga fokus analisis pada wilayah dengan peran ekonomi perikanan yang paling signifikan, menghindari perluasan hingga 20 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia dapat mempersulit untuk mengidentifikasi pola, karakteristik dan faktor yang memengaruhi kinerja perikanan. Selain itu, konvensi top 10 juga telah umum diterapkan dalam literatur ekonomi dan perikanan untuk menyoroti provinsi dengan kontribusi yang paling signifikan (daftar provinsi terlampir di Lampiran 2). Hasil analisis ini dapat menjadi sumber penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan nasional perikanan, sekaligus sebagai acuan perbandingan bagi provinsi penghasil perikanan rendah untuk meningkatkan kinerja dan daya saing mereka.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang bervariasi serta fenomena yang terjadi, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi celah tersebut yang bertujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman. Maka penulis tertarik menganalisis lebih lanjut tentang **”Analisis PDRB Subsektor Perikanan di Indonesia”**, dengan menggunakan regresi data panel dan jumlah observasi sebanyak enam tahun yaitu tahun 2019 hingga 2024. Fokus objek penelitian pada sepuluh provinsi di Indonesia yang merupakan provinsi penghasil perikanan tertinggi berdasarkan BPS tahun 2019 yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Jawa Barat, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, dan Papua.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan penjelasan latar belakang tersebut, disimpulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh volume produksi perikanan tangkap terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh angka konsumsi ikan terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh volume ekspor perikanan terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh volume produksi perikanan tangkap, angka konsumsi ikan dan volume ekspor perikanan terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan pemaparan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh volume produksi perikanan tangkap terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh angka konsumsi ikan terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh volume ekspor perikanan terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh volume produksi perikanan tangkap, angka konsumsi ikan dan volume ekspor perikanan terhadap PDRB subsektor perikanan pada sepuluh provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk menyampaikan informasi, di antaranya:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berlandaskan pemaparan tujuan penelitian diatas, sehingga manfaat teoritis yang akan didapatkan pembaca adalah sebagai berikut:

1. Penguatan teori pertumbuhan ekonomi, menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi sumber daya, khususnya mengenai PDRB subsektor perikanan.
2. Menguatkan dan menguji kembali model-model teoritis yang menjelaskan keterkaitan antar-variabel dalam rantai nilai perikanan.
3. Menjadi dasar bagi pengembangan model ekonometrika atau regresi data panel yang lebih kompleks di masa depan, yang melibatkan lebih banyak

variabel makroekonomi dan lingkungan dalam memprediksi kinerja ekonomi subsektor perikanan di berbagai wilayah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berlandaskan pemaparan tujuan penelitian diatas, sehingga manfaat praktis yang akan didapatkan pembaca adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan bagi pemerintah, khususnya dalam menentukan prioritas kebijakan untuk memaksimalkan kontribusi PDRB subsektor perikanan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pelaku usaha yaitu, nelayan, eksportir dan industri pengolahan dalam mengambil keputusan mengenai volume tangkapan, peningkatan ekspor, dan strategi pengembangan pasar domestik
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan pemikiran akademis yang komprehensif khususnya bagi peneliti yang tertarik pada topik ekonomi kelautan dan perikanan.